



Dana Pengamanan Pilkada Gunakan Anggaran 'Nyalip'

BANGLI, NusaBali

Pemkab Bangli merespons cepat keluhan yang disampaikan pihak kepolisian dan TNI, mengenai belum cairnya dana pengamanan Pilkada Bangli, tahun 2015. Sekkab Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra saat dikonfirmasi, mengatakan pihaknya tengah mengupayakan dana pengamanan ini, agar segera cair dan bakal menggunakan anggaran mendahului.

"Untuk penggunaan dana mendahului ini, sudah kita sampaikan pada pihak dewan," ujarnya, Rabu (19/8). Dia menambahkan, untuk kisaran dana pengamanan ini mencapai Rp 2,2 miliar untuk kepolisian. Sebelumnya pihak kepolisian men-

gajukan permohonan sebesar Rp 4 miliar lebih. Sedangkan dari TNI mengajukan permohonan Rp 800 juta. "Kita memandang untuk dana pengamanan tersebut, memang sangat urgent," katanya.

Sebelumnya dalam dialog interaktif pihak Polres Bangli dan Kodim Bangli mengeluhkan belum cairnya dana pengamanan sehingga mereka terpaksa menggunakan uang persediaan yang dimiliki.

Disinggung kenapa dana pengamanan ini tidak masuk dalam APBD Induk 2015, kata dia, ini tidak terlepas dari keluarnya Perppu tentang pemilihan kepala daerah. Kalau sebelumnya, Pilbup direncanakan dipilih DPRD.

Disamping itu belum adanya

mandat pemberian hibah untuk institusi itu. Setelah APBD ketok palu, barulah ada mandat pemberian hibah pengamanan.

"Mudah-mudahan di APBD perubahan segera ketok palu, sehingga dana pengamanan tersebut bisa segera dicairkan," akunya.

Dia menambahkan, untuk dana Rp 2,2 miliar tersebut, tidak termasuk dana kontingensi apabila terjadi kerusuhan dan keadaan darurat. Untuk dana kontingensi, pihaknya sudah menganggarkan Rp 500 juta.

Dana ini, ditaruh dalam pos anggaran belanja tak terduga. "Mengenai penggunaan dana mendahului ini, kita bakal meminta fatwa dari BPKP Provinsi Bali," ujarnya. **cr53**

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 8



Kasus Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi Hakim Ragukan Keterangan Saksi Ahli



TERDAKWA, Made Sueca Antara, anggota DPRD Jembrana yang terjerat kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (19/8).

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan terdakwa anggota DPRD Jembrana, Made Sueca Antara dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari BPKP Wilayah Bali. Dalam sidang, majelis hakim meragukan keterangan saksi ahli terkait perhitungan kerugian negara.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Achmad Peten Sili langsung mencecar saksi ahli BPKP, Arif Sunardi terkait cara perhitungan kerugian negara dalam kasus ini. Arif mengatakan cara perhitungan kerugian negara dilakukan dengan cara menghitung buku laporan pengeluaran UD Sumber Maju milik terdakwa. "Dalam buku ter-

dapatkan jumlah liter BBM bersubsidi yang dibeli. Hal ini langsung memantik emosi hakim yang meragukan cara perhitungan saksi ahli. "Bagaimana kami bisa percaya jika hitungan kerugian negara itu valid. Apakah bisa dipastikan uang itu dipakai untuk membeli BBM bersubsidi," tanya majelis hakim.

Arif mengatakan hanya bisa menghitung kerugian negara dengan cara tersebut karena kurangnya barang bukti yang didapat. Arif sendiri menyatakan jika hitungan tersebut hanya berdasarkan keyakinan. "Kami tidak dapat menemukan laporan lainnya di SPBU atau di UD Sumber Maju sebagai bahan untuk menghitung kerugian negara," jelasnya. Selain meragukan cara perhitungan n-

sebut tidak disebutkan jumlah liter BBM subsidi yang dibeli. Tapi hanya ditulis jumlah uangnya saja," jelasnya.

Dari jumlah uang tersebut, Arif menghitung dengan cara m e m b a g i dengan harga BBM bersubsidi untuk men-

egara, majelis hakim juga mencecar soal jenis usaha UD Sumber Maju.

Pasalnya, dalam SIUP dinyatakan jika jenis usaha UD Sumber Maju merupakan usaha kecil yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari Dinas Perindagkop. Namun, dalam rekomendasi disebutkan jika UD Sumber Maju merupakan usaha mikro yang bisa mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. "Kalau begini mana yang anda pakai sebagai rujukan. Apakah SIUP atau rekomendasi," tanya majelis hakim.

Arif menyatakan menggunakan keduanya sehingga dipastikan UD Sumber Maju tidak layak mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi. Namun ia menegaskan jika yang bertanggung jawab dalam kerugian negara ini, yaitu dinas yang mengeluarkan rekomendasi.

"Itu kewenangan dinas yang mengeluarkan rekomendasi," tegasnya. Sementara itu, salah satu saksi kunci, yaitu Ami Santoso hingga kini tak kunjung dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal, Ami disebut merupakan salah satu pemilik UD Sumber Maju yang harusnya ikut bertanggung jawab dalam kasus ini. JPU Suhadi sendiri membenarkan Ami merupakan pemilik mesin di UD Sumber Maju. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci kenapa Ami tak kunjung dihadirkan dalam sidang. rez

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 5



Civic Center

Bakal Ditata Ulang di 2016

Penataan kawasan perkantoran di atas lahan seluas sekitar 63 hektare, itu memasuki tahap perencanaan dengan nilai total investasi Rp 224 miliar.

DENPASAR, NusaBali

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan pusat perkantoran dan pemerintahan (civic center) di kawasan Niti Mandala, Kota Denpasar, akan ditata ulang dan dilakukan beberapa pembangunan fisik mulai awal 2016.

"Rencana penataan ulang kawasan ini merupakan upaya mewujudkan kawasan civic centre yang terkelola dengan baik dan ramah lingkungan, serta selanjutnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Sudikerta saat meninjau kawasan tersebut,

Rabu (19/8).

Sudikerta pada kesempatan itu meninjau kawasan tersebut dengan berjalan kaki dari Jalan Cok Agung Tresna-Jalan M Yamin-Jalan Raya Puputan, dan Jalan Tantular Denpasar.

Di kawasan civic center ini setidaknya terdapat sejumlah kantor instansi pemerintahan seperti Kantor Gubernur Bali, kantor DPRD Bali, dan kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Bali, Sekretariat KPU Bali, Sekretariat KPU Denpasar, beberapa kantor instansi vertikal, kantor BUMN, hingga gedung perbankan.

Dalam kesempatan itu, Sudikerta juga menyoroti sejumlah pohon perindang jalan yang sudah miring serta bentuknya tidak tertata. Dia lalu memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Ketut Wisada untuk segera menindaklanjuti dengan segera melakukan peremajaan pohon perindang.

Sudikerta juga meminta agar nantinya pembangunan pedestrian sepanjang kiri kanan jalan disesuaikan luas tepi jalan yang ter-

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 2



Sambungan - - -



WAKIL Gubernur Bali Ketut Sudikerta (kiri) bersama sejumlah pejabat, meninjau civic center di kawasan Niti Mandala Denpasar, Rabu (19/8).

• HUMAS PEMPROV BALI

sedia. "Jika tepi jalan yang tersedia sempit maka dibangun pedestrian saja. Namun jika lahan cukup luas maka akan dibangun taman yang dilengkapi dengan kanopi dan tempat beristirahat bagi pejalan kaki," ucapnya.

Selain itu, dia juga menginstruksikan agar dilakukan

penertiban terhadap warung-warung pinggir jalan yang melanggar peraturan dan masuk ke badan jalan.

Sementara itu, Agung Budi yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Bangunan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Pe-

nataan Bangunan Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) memaparkan bahwa penataan kawasan yang menggandeng pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Denpasar ini telah memasuki tahap perencanaan dengan nilai total investasi sebesar Rp 224 miliar.

Berdasarkan Rencana Tindakan Bangunan dan Lingkungan, penataan lahan seluas 63 hektare ini akan meliputi penataan taman, drainase, ruang hijau terbuka (RHT), serta pembuatan pedestrian sepanjang bahu sisi kiri dan kanan sepanjang jalan kawasan civic center tersebut

Turut mendampingi peninjauan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, Kepala Biro Aset Pemprov Bali I Ketut Adiarsa, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Ketut Wisada, dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Denpasar Kadek Kusuma Diputra. **ant**

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 2



PATROLI

Dugaan Korupsi Jembatan Lemukih, Buleleng Terdakwa Ngaku Dapat Perintah Lisan dari Atasan

DENPASAR, NusaBali

Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, I Made Suitra yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini. Dalam keterangannya, Suitra beberapa kali menyeret Kepala Dinas PU Buleleng yang merupakan atasannya.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (18/8) majelis hakim pimpinan Gede Ariyadi langsung mencecar Suitra terkait pembangunan jembatan pada 2012 silam. Dalam keterangannya, Suitra mengatakan pemenang lelang proyek ini, yaitu PT Aristya Prima Ayu dengan nilai kontrak Rp 2,6 miliar. "Ini untuk pembangunan tiga jembatan, yaitu Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II," jelas Suitra.

Proyek ini sendiri mulai dilaksanakan pada Juni hingga Desember 2012. Namun di tengah pengerjaan, PT Aristya tidak melanjutkan pengerjaan proyek tersebut. Pada November, PT Aristya malah mensub kontrakkan proyek ini kepada kontraktor lokal, I Made Sudiawan. "Waktu pengerjaan mangkrak saya sudah melakukan teguran berulang-ulang kepada PT Aristya," jelasnya.

Setelah proyek disub kontrakkan, pada Desember PT Aristya mencairkan uang muka proyek Rp 500 juta disusul dengan pembayaran termin I sebesar Rp 800 juta. Masalah timbul dalam pembayaran termin I ini. Pasalnya, dalam laporan, PT Aristya menyatakan telah mengerjakan 45 persen proyek jembatan tersebut. Namun kenyataan di lapangan hanya 23 persen pengerjaan yang telah diselesaikan.

Majelis hakim sempat menanyakan terkait pencairan termin I yang ditandatangani terdakwa sebagai PPK. Namun terdakwa menyatakan jika pencairan tersebut atas perintah dari Kepala Dinas PU saat itu. "Saya mendapatkan perintah lisan dari atasan saya. Makanya saya cairkan," jelasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), AA Alit dkk juga sempat mencecar Suitra terkait tanggal pengajuan pembayaran termin hingga pencairan yang dilakukan pada hari yang sama, yaitu pada 30 Desember 2012. Suitra menjawab hal tersebut dilakukan karena sudah batas akhir pencairan. "Itu kami lakukan karena sudah di akhir tahun. Itu juga persetujuan kepala dinas," tegasnya. Usai pemeriksaan Suitra, majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada, Selasa (25/8) mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. rez

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 5



Fungsi Sentral Parkir Kuta Dinilai Melenceng

MANGUPURA, NusaBali

Sentral parkir di Kuta disorot karena dinilai telah melenceng dari tujuan awal pembangunannya. Tujuan pembangunan sentral parkir salah satunya memecah kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di Kuta.

Mantan anggota DPRD Badung yang kini menjadi Ketua Tim Ahli DPRD Badung I Wayan Puspa Negara, melihat ide awal pembangunan sentral parkir sangat-sangat bagus. Digagas pada tahun 1988 pada zaman Bupati Badung I Gusti Bagus Alit Putra, sentral parkir diharapkan dapat memberikan solusi memecah kemacetan di Kuta. Namun dalam pergantian kepemimpinan di Badung, perhatian terhadap Kuta dan sentral parkir Kuta mulai melemah. Tidak pernah ada perencanaan lanjutan.

"Tujuan pembangunannya untuk menata Kuta dari ke-

semrawutan parkir dan lalu lintas. Bus yang masuk Kuta harus transit menurunkan penumpang

di sentral parkir. Untuk selanjutnya didrop dengan shuttle bus khusus, sehingga mengurangi kesem-



BUS pariwisata dan shuttle bus di Sentral Parkir Kuta, Rabu (19/8). Sentral parkir disorot karena dinilai melenceng dari tujuan awal pembangunannya. • NUSABALI/YUDA

rawutan Kuta," kata Puspa Negara, Rabu (19/8).

Tapi kenyataannya banyak bus yang tak lagi menurunkan penumpang di dalam sentral parkir. Karena pengawasan yang dinilai lemah, banyak bus pariwisata menurunkan penumpang di tempat lain.

Bahkan sentral parkir yang saat ini dikelola pihak ketiga, menjadi lebih berorientasi bisnis, penunjang parkir untuk mal, ruko, dan hotel. "Padahal harusnya sistem efektivitas parkirnya yang dikembangkan untuk penataan parkir dan lalu lintas di Kuta," ucapnya.

Oleh karena itu, Puspa mengharapkan Pemkab Badung segera melakukan langkah konsolidasi dan menata ulang peruntukan Sentral Parkir Kuta. Sehingga dengan perencanaan baru, sentral parkir bisa lebih dimanfaatkan lagi untuk kepentingan yang lebih luas demi ma-

syarakat. Misalnya, bisa dibuatkan basement parkir yang luas dan bertingkat.

"Artinya Pemkab Badung harus melihat ini sebagai prioritas penataan, jika tidak ingin kehilangan PAD karena Kuta semakin semrawut," harap Puspa.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Badung I Wayan Weda Dharmaja menyangkal tuduhan tersebut. Ia menilai sentral parkir yang berdasarkan SK Menteri Perhubungan termasuk kategori tipe C justru berfungsi baik sejauh ini. Petugas jaga pun bekerja dan melakukan pengawasan dengan normal setiap harinya. "Masih berfungsi dengan baik kok," ujarnya. "Tidak ada perubahan, staf kami juga ada lima orang di sana," bantah Weda.

Tetapi saat ditanya terkait penyempitan lahan untuk parkir di sentral parkir, Weda enggan berkomentar. as

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 2



PATROLI

Dugaan Korupsi Jembatan Lemukih, Buleleng Terdakwa Ngaku Dapat Perintah Lisan dari Atasan

DENPASAR, NusaBali

Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, I Made Suitra yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini. Dalam keterangannya, Suitra beberapa kali menyeret Kepala Dinas PU Buleleng yang merupakan atasannya.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (18/8) majelis hakim pimpinan Gede Ariyadi langsung mencecar Suitra terkait pembangunan jembatan pada 2012 silam. Dalam keterangannya, Suitra mengatakan pemenang lelang proyek ini, yaitu PT Aristya Prima Ayu dengan nilai kontrak Rp 2,6 miliar. "Ini untuk pembangunan tiga jembatan, yaitu Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II," jelas Suitra.

Proyek ini sendiri mulai dilaksanakan pada Juni hingga Desember 2012. Namun di tengah pengerjaan, PT Aristya tidak melanjutkan pengerjaan proyek tersebut. Pada November, PT Aristya malah mensub kontrakkan proyek ini kepada kontraktor lokal, I Made Sudiawan. "Waktu pengerjaan mangkrak saya sudah melakukan teguran berulang-ulang kepada PT Aristya," jelasnya.

Setelah proyek disub kontrakkan, pada Desember PT Aristya mencairkan uang muka proyek Rp 500 juta disusul dengan pembayaran termin I sebesar Rp 800 juta. Masalah timbul dalam pembayaran termin I ini. Pasalnya, dalam laporan, PT Aristya menyatakan telah mengerjakan 45 persen proyek jembatan tersebut. Namun kenyataan di lapangan hanya 23 persen pengerjaan yang telah diselesaikan.

Majelis hakim sempat menanyakan terkait pencairan termin I yang ditandatangani terdakwa sebagai PPK. Namun terdakwa menyatakan jika pencairan tersebut atas perintah dari Kepala Dinas PU saat itu. "Saya mendapatkan perintah lisan dari atasan saya. Makanya saya cairkan," jelasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), AA Alit dkk juga sempat mencecar Suitra terkait tanggal pengajuan pembayaran termin hingga pencairan yang dilakukan pada hari yang sama, yaitu pada 30 Desember 2012. Suitra menjawab hal tersebut dilakukan karena sudah batas akhir pencairan. "Itu kami lakukan karena sudah di akhir tahun. Itu juga persetujuan kepala dinas," tegasnya. Usai pemeriksaan Suitra, majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada, Selasa (25/8) mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. rez

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 5



Uang Lauk Pauk Makin Tak Jelas

Pegawai Humas dan Protokol Setda Tabanan mendatangi Bagian Keuangan namun mereka juga tak dapatkan data.

TABANAN, NusaBali

Uang lauk pauk (ULP) yang didambakan para pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tabanan makin tak jelas juntrungannya. Sebab versi Bappeda

Tabanan, tak ada istilah ULP di Tabanan, melainkan uang beban kerja. Berapa nominal uang beban kerja yang didapatkan PNS di Tabanan masih misteri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja mengakui saat apel tanggal 14 Oktober 2014 mengakui sempat menyinggung ULP bagi PNS. Ia menyebutkan PNS akan dapat uang lauk pauk sebesar Rp 300 ribu per bulan, namun dipotong Rp 100 ribu untuk pembelian beras sehat. "Memang dapat ULP, tapi bentuknya beban kerja. Dalam apel itu jika disimak secara utuh, saya jelaskan bahwa

eponnya, dan siap berikan data. Namun pegawai Humas dan Protokol Setda Tabanan yang datang ke Bagian Keuangan juga tak diberikan data.

Sebelumnya Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa mengaku Pemkab Tabanan komit berikan ULP bagi PNS, namun bentuknya uang beban kerja. Ia pun menganjurkan agar minta data ke Kabag Keuangan. "Pak Sekda tak ada nelepon saya. Bukan kapasitas saya berikan keterangan, itu adalah kapasitas Kabag Humas. Silakan telepon Kabag Humas, biar nanti saya berikan penjelasan," ungkap Wirawan per telepon, Selasa

PNS mendapat uang lauk pauk namun bentuknya uang beban kerja," terang Wiratmaja, Rabu (19/8).

Hanya saja Wiratmaja tak bisa menjelaskan berapa uang beban kerja yang didapatkan para PNS sebagai ganti ULP. Apakah sebesar Rp 300 ribu? "Ada Surat Keputusan (SK) di Bagian Keuangan. Saya tak hafal," jawab Wiratmaja yang saat dihubungi tugas di Jogjakarta. Sayangnya, Kepala Bagian Keuangan Setda Tabanan, Wayan Arimbawa belum bisa dikonfirmasi terkait dana beban kerja tersebut. Sebelumnya ia menyarankan agar Humas dan Protokol Setda Tabanan menel-

(19/8) malam.

Sementara PNS di Tabanan merindukan ULP yang pernah dijanjikan pemerintah sebesar Rp 300 ribu per bulan. Namun janji ULP yang akan dicairkan mulai bulan Januari 2015 tak kunjung terealisasi. Informasi terbaru, uang beban kerja yang dikatakan didapat pegawai juga timpang. Misal kepala dinas dapat uang beban kerja Rp 1 juta per bulan, sekretaris dinas terpaut jauh, tak sampai seratusan ribu. "Janji dapat uang lauk pauk ada, tapi sampai sekarang tak ada apa-apanya," ungkap salah seorang PNS di Tabanan. **k21**

Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Hal : 7